

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Mesir selama ini merupakan objek studi yang menarik. Negara itu adalah salah satu negara Arab pertama di Timur Tengah yang terkena pengaruh langsung dari Eropa. Secara umum, didalam prestasi budaya dan intelektual, Mesir berada di barisan terdepan diantara negara-negara Arab.

Dalam pemerintahan Mesir pada abad ke-20, telah terjadi perubahan dalam sistem kekhilafahan yang kemudian diganti dengan sistem pemerintahan republic. Dari peristiwa tersebut munculah oposisi-oposisi yang menentang hal itu dan ingin tetap mempertahankan sistem kekhilafahan. Setelah Raja Faruk terkalahkan dalam revolusi yang dipimpin oleh Naguib, maka pertamakalinya Mesir memiliki presiden yaitu naguib yang sekaligus merangkap sebagai perdana menteri.

Pada tahun 1958, pengganti Naguib yaitu Gamal Abdul Nasser yang menjadi presiden secara otomatis menggantikan Naguib. Nasser hanya menjabat presiden Mesir selama 12 tahun, setelah itu digantikan oleh Anwar Sadat, yang menjadi presiden otomatis pengganti Nasser, karena pada waktu itu system kepresidenan berlaku secara turun temurun. Baru setelah itu pada tahun 1981 Hosni Mubarak menjadi presiden Mesir melalui pemilu. Hal tersebut sangat

menarik untuk dijadikan suatu penelitian bahwa telah terjadi suatu perubahan menuju pemerintahan yang demokrasi.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Mesir dewasa ini adalah sebuah negara yang berbentuk republik dengan nama lengkap *Jumhuriyah Mishr al- Arabiyah* (Republik Arab Mesir). Negara Mesir terletak di pantai timur laut Benua Afrika. Sebelah utara berbatasan dengan laut Tengah, sebelah selatan dengan negeri Sudan, sebelah timur dengan jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah, serta sebelah barat dengan Libya. Luas daerahnya sekitar 997,739 km<sup>2</sup>, penduduknya berjumlah 54.609.000 jiwa (sensus tahun 1990); sekitar 90% (data tahun 1986) beragama Islam (Sunni). Ibukotanya Kairo, dan bahasa resminya bahasa Arab.<sup>1</sup>

Mesir adalah negara terpadat kedua di Afrika. Petani miskin yang di sebut dengan *Fellahin* (atau kaum *Fellah*) mencakup 40% penduduknya. Namun hanya kurang dari 4% lahan Mesir cocok untuk petani. Sebelum para pemimpin revolusi 1952 memperkenalkan reformasi lahan, kurang dari 2% pemilik tanah menguasai separuh tanah pertanian. Sebagian besar kaum *fellah* adalah buruh tani atau hanya memiliki lahan yang sangat kecil. Orang yang memiliki 1-2 hektar tanah dianggap kaya. Kini tidak seorangpun diizinkan memiliki lebih dari 20 hektar dan rata-rata petani Mesir umumnya memiliki tidak lebih dari tanah seluas itu.

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Bandung: Paramadina, 2001), hal 32.

Sejarah negara bangsa diawal abad ke-20 didominasi oleh tema besar tentang penghapusan kekhalifahan Turki Utsmani menjadi Republik oleh Dewan Nasional Agung pada tanggal 3 Maret 1924.<sup>2</sup> Diterapkannya sistem politik sekuler ini sedikit banyak menjadi beban ideologis bagi sebagian umat Islam di Mesir. Diantara mereka ada yang ingin tetap mempertahankan khilafah sebagai salah satu politik Islam dan adapula yang menghendaki konsep demokrasi yang cenderung sekularistik.

Dalam kondisi demikian, lahir gerakan-gerakan Islam yang berorientasi politik. Diantaranya adalah Ikhwanul Muslimin pada 1928 yang dipelopori Sayyid Hasan al-Bana di Mesir. Gerakan ini berupaya mendefinisikan Islam sebagai sistem politik, mengikuti kecenderungan ideologi-ideologi besar yang ada diabad ke-20.

Protectorat Inggris atas Mesir berlangsung sampai Februari 1922 ketika kerajaan Mesir dibawah Raja Fuad (1926-1936) merdeka, tetapi dengan syarat yang berkaitan dengan pertahanan negara dan perlindungan kepentingan asing.<sup>3</sup> Sejak memperoleh kemerdekaan itu, Mesir pernah mengalami beberapa bentuk sistem politik.

Hal ini tercermin dari adanya beberapa perubahan konstitusi. Tahun 1923 diundangkan sebuah konstitusi untuk mengatur sistem politik pada waktu itu. Bentuk negara adalah Monarki Konstitusional. Negara dikepalai oleh Raja dan Pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Tetapi Sistem ini kemudian berubah setelah adanya kudeta tahun 1952. Kudeta militer atau dikenal dengan

---

<sup>2</sup> A. Mukti Ali, *Sekularisasi di Turki Modern*, Jakarta, Djambatan, 1994, cet. I, hal 85.

revolusi 1952, terjadi pada tanggal 23 Juli 1952 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mohammad Naguib, Panglima Perang dalam pemerintahan Raja Farouk, yang menyebabkan Raja Farouk harus turun tahta.

Mesir menjadi Republik pada 18 Juni 1953 dengan Naguib sebagai Presiden merangkap Perdana Menteri. Konstitusi yang ada setelah tahun 1953 ternyata dalam perkembangannya mengalami perubahan kembali tahun 1971. Perubahan-perubahan konstitusi ini bisa dilihat dalam tabel :

**TABEL 1.1**

**Beberapa Konstitusi Mesir**

<b>Tanggal diundangkan</b>	<b>Jenis konstitusi</b>
19 April 1923	Keputusan Kerajaan No. 42 th.1923 tentang Konstitusi Mesir.
16 Januari 1953	Pernyataan Pemerintah dalam masa transisi.
10 Februari 1953	Pernyataan tentang Pemerintah dalam masa transisi selama tiga tahun.
18 Juli 1953	Pernyataan Konstitusi oleh Dewan Komando Revolusioner tentang berdirinya Republik Mesir.
16 Januari 1956	Konstitusi Republik Mesir.
5 Maret 1958	Konstitusi Sementara Republik Persatuan Arab.
25 Maret 1964	Konstitusi Republik Persatuan Arab.
11 September 1971	Konstitusi Republik Arab Mesir.

Sumber: Bruce M. Brothwick, *Comparative Politics of Middle East; An Introduction*, New Jersey, Prentice-Hall, 1980 hlm. 174 dan dalam M Riza Sihbudi, *Konflik dan Diplomasi di Timur tengah*, Bandung, P.T Eresco, 1993, hlm. 88.

Pada masa transisi, Nasser berusaha mengarahkan kekuasaan politik ke satu tangan sehingga pada tanggal 16 Januari 1956 ketika itu masa transisi tiga

tahun selesai, kekuasaan sudah berpusat di tangan Presiden. Hal ini bisa dilihat dari konstitusi yang diundangkan pada hari itu dan referendum seminggu kemudian. Konstitusi tersebut mengatur adanya partai politik tunggal, yaitu: Uni Nasional. Sebuah Dewan Nasional yang berfungsi sebagai legislatif, akan tetapi baik parpol maupun kontrol Nasser.<sup>4</sup>

Pada bulan Februari 1958, Mesir dan Suriah sepakat untuk membentuk suatu negara gabungan dengan nama Republik Persatuan Arab (RPA). Maka tanggal 5 Maret 1958 diundangkan konstitusi sementara RPA dan Nasser sebagai Presidennya.<sup>5</sup> Menurut konstitusi sementara tersebut, presiden dibantu wakil presiden, para menteri kabinet, Dewan Nasional dan Dewan Regional. Orang Mesir dan orang Suriah diusahakan terwakili dalam setiap lembaga pemerintahan, tetapi biasanya hanya orang-orang yang mendapatkan persetujuan Nasser saja yang bisa memasuki lembaga yang ada.

Babak baru politik Mesir dimulai bersamaan dengan kematian Nasser, tanggal 29 September 1970 yang kemudian digantikan oleh Anwar Sadat. Setahun Sadat berkuasa, konstitusi baru diundangkan. Konstitusi ini kemudian di referendum pada tanggal 11 September 1971. Menurut konstitusi ini, Mesir adalah negara Republik dengan sistem multi partai (pasal 5). Kekuatan berada ditangan rakyat (pasal 3). Islam adalah agama asli negara dan syariat Islam adalah sumber perundang-undangan. Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara (pasal 2). Disamping itu, secara tegas dijelaskan, bahwa Republik Arab Mesir adalah sebuah

---

<sup>4</sup> *Democrat Reich Arab Republic of Egypt* dalam David E. North *Africa*, Colorado, Westview Press

negara Demokrasi dan Sosialis yang berdasarkan kepada aliansi kekuatan pekerja rakyat (pasal 1).<sup>6</sup>

Sistem politik Mesir terdiri dari tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan pers merupakan kekuatan rakyat yang keempat. Kepala negara adalah seorang Presiden (*Rais Al Jumhuyah*) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan (*Majelis al-Sha'b*) dan disahkan dengan referendum oleh rakyat. Masa jabatan Presiden adalah 6 tahun sejak hasil referendum diumumkan dan ia dapat dipilih kembali.

Selama kepemimpinan Nasser kebijakan politik luar negeri Mesir sangat pro Soviet, sikap ini didorong karena Amerika Serikat dimasa Eisen Hower bersikap dingin dan "reserved" terhadap Mesir sehingga Mesir akhirnya mencari alternatif lain dalam membangun ekonomi dan politiknya.

Kondisi ini berbeda dengan Anwar Sadat menjadi Presiden, ia lebih realistis dalam membawa arah politik luar negeri Mesir. Sadat menyadari bahwa untuk menjadi pemimpin Dunia Arab tidak mungkin terlaksana dengan kebesaran militer semata tapi rapuh secara ekonomi. Sadat melakukan tiga hal yang membedakan secara mencolok dengan rezim Nasser. *Pertama*, Sadat menjalankan politik pintu terbuka (*Infitah*) di bidang ekonomi. *Kedua*, merubah politik luar negeri Mesir dari orientasi pro Sofiet menjadi pro Amerika. Sedangkan masalah *Ketiga*, adalah tidak saja Mesir di jaman Sadat mengakui Israel, melainkan juga meratifikasi perjanjian dan melaksanakan normalisasi hubungan dengan Israel,

Sadat mencoba menerangkan bahwa pemerintahannya menghendaki berakhirnya legitimasi revolusioner yang harus diganti dengan legitimasi konstitusional.

Hal ini berbeda dengan suasana kematian Presiden Mesir selepas itu yaitu Anwar Sadat. Walaupun kematiannya pada 6 Oktober 1981 adalah dalam keadaan yang begitu mengerikan, tetapi hanya sebagian kecil saja rakyat yang merasa sedih. Fenomena ini terjadi dengan di ikuti dasar pemerintahan bercorak diktator yang diamalkan oleh beliau. Pada masa pemerintahannya, Mesir menggunakan dasar yang agak terbuka dan disenangi oleh Yahudi dan Barat. Mesir yang dahulunya adalah sebuah negeri yang damai, tetapi setelah Presiden Anwar Sadat mematerai satu perjanjian yang dinamakan "Perjanjian Camp David" dengan Perdana Menteri Israel, Menachen Begin, berbagai bencana dan kerusakan telah berlaku dalam negara ini. Mesir mungkin telah memahami sepenuhnya resiko akibat perjanjian dengan Yahudi, hal ini disebabkan karena ingin mendapat sokongan Amerika, maka Mesir sanggup membelakangkan nilai moral dan agama bagi mendapatkan perlindungan Amerika sehingga penyisihan negara-negara Arab yang lain hanya bersifat sebagai perkara kecil saja.

Anwar Sadat dan Mesir terpaksa menerima resiko atas pendiriannya yang menyalahi aspirasi negara-negara Arab. Sadat dengan lantang menyatakan akan terus menggunakan dasar kekerasan terhadap para penentangannya daripada golongan al-Ikhwan yang dianggap membawa rakyat Mesir ke arah zaman kemunduran. Setelah pembunuhan Presiden Mesir itu, timbul pula suara-suara selepas itu untuk memulihkan kedudukan Mesir dalam dunia Arab. Amerika sekali lagi menguji pendirian Mesir selaras beritanya mengenai perjanjian yang

dicapai melalui perjanjian Camp David. Kemudian diikuti pula dengan dukungan ketenteraan Mesir terhadap Iraq ketika serangan terhadap Iran dilakukan. Amerika secara khusus menyokong Iraq kerana melihat sifat dinamik gerakan revolusi Islam Iran. Sebelumnya, Mesir yang disingkirkan oleh negara-negara Arab secara automatik diterima kembali kerana kesediaan beraksi di pihak Arab untuk menentang Iran yang bukan Arab pada tahun 1980.

Peranan aktif yang dimainkan oleh Mesir ini membolehkan Mesir menduduki senarai, menerima bantuan ekonomi dan ketenteraan yang kedua terbesar dari Amerika selepas Israel. Hubungan dengan Amerika bertambah erat latihan ketenteraan bersama diadakan dan perjanjian penempatan pengkalan 'darurat' untuk Amerika diatur. Nampaknya, pengorbanan sebelum ini belum cukup bagi menguji kesetiaan Mesir terhadap Amerika dan memerlukan bukti bahawa Mesir bersedia berkorban pada masa yang diperlukan.

Presiden Mesir selepas itu, Mohammad Husni Mubarak telah berikrar untuk meneruskan perjuangan Sadat tetapi tidak menjamin persamaan dasar. Tanda-tanda semakin jelas membuktikan bahawa beliau mengkaji dengan teliti segala aspek kelemahan rezim itu supaya tidak terulang. Perkara utama yang ditekankan sebagai program kerja presiden untuk membangunkan Mesir dewasa ini ialah sebagai berikut:

- a) Memulihkan sistem demokrasi dengan membuka komunikasi dua hal antara pemerintah dan rakyat
- b) Memulihkan kedudukan Mesir dalam dunia Arab, tetapi ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta untuk mengalahkan kekuasaan Israel



- c) Memulihkan keadaan ekonomi Mesir agar tidak bergantung sepenuhnya lagi kepada Amerika Serikat.

Walau bagaimanapun, apabila berlakunya Perang Teluk, Presiden Husni Mubarak dengan terang-terangan menunjukkan penentangan terhadap Iraq. Presiden Husni Mubarak telah dinobatkan oleh media Amerika walaupun terpaksa menyelewengkan fakta sejarah tentang peranan penting yang selama ini dimainkan oleh Jamal Abdul Naseer.

Amerika nampaknya ingin terus menguasai Mesir, tetapi hanya berstatus layaknya harimau dalam kandang yang melambangkan sikap kompromi dan penghargaan atas usaha-usaha gigih yang telah dirintis sejak zaman Anwar Sadat. Selepas perang saja, Presiden Amerika, George Bush pada waktu itu meminta kongres meluluskan penjualan jet pejuang F-16 bernilai USD 4.3 ribu juta (RM 11.61 ribu juta) kepada Mesir.

Persoalannya, Mesir dibiarkan secara istimewa terus menjadi kuasa militer. Dari sudut geografi, seperti juga Syria, Mesir tergolong dalam 'frontier'. Tambahan pula, Mesir pernah mengepalai dua peperangan dengan Israel pada tahun 1967 dan 1973. Kejatuhan Shah Iran menyebabkan AS perlu mendekati Iran dengan segera. Mesir pula kini dilihat sedang menonjolkan diri dalam arena politik Timur Tengah, bukannya untuk menentang Yahudi.

Kini, terbukalah mata dunia bahwa keadaan dalam negeri Mesir tidaklah stabil sebagaimana yang digembar-gemburkan. Pemboikotan dunia Arab terhadap

Kini, dunia Arab serta dunia Islam masih bersikap menunggu dan melihat apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Presiden Husni Mubarak. Adakah beliau mampu mengembalikan kedudukannya yang kian tergugat atau sebaliknya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Menjelajah (*explorating*) hubungan integral antara wacana Islam politik dan Negara Islam.
2. Menciptakan frame demokrasi yang dapat di kontekstualisasikan dengan politik Islam Mesir.
3. Sebagai wacana alternative untuk melihat proses demokrasi di Mesir.
4. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai metodologi ilmu Hubungan Internasional dan teori-teori Hubungan Internasional khususnya pada teori-teori yang berkaitan dengan modernisasi Barat terhadap politik Islam di Mesir.
5. Penulisan ini untuk Mendeskripsikan pengaruh modernisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat (demokratisasi) terhadap politik Islam yang ada di Mesir.
6. Untuk Mendeskripsikan konflik-konflik yang terjadi dalam peradaban Negara Islam, Islam Syura, setelah masuknya Modernisasi Barat melalui demokratisasi.
7. Melengkapi tugas akhir, yaitu penelitian ini akan dijadikan Skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penulisan Skripsi ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pemerintahan Mesir (Husni Mubarak) melakukan proses modernisasi politik ?

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

##### **1. TEORI MODERNISASI.**

Pendekatan dengan memakai teori modernisasi digunakan oleh Daniel E. Lerner di dalam bukunya, *The Passing of Traditional Society*, yang terbit pada tahun 1964, sebagai alat untuk menganalisa masyarakat Timur Tengah. Menurut Lerner, "Kemoderenan (terutama), menyangkut suatu keadaan pikiran harapan untuk maju, kecenderungan untuk tumbuh, kesiapan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.<sup>7</sup> Dilain pihak, masyarakat tradisional adalah masyarakat yang tidak mau berpartisipasi, terisolir, dan wawasannya terbatas pada lingkungan setempat.

Premise utama teori modernisasi adalah bahwa kebanyakan masyarakat di daerah-daerah yang disebut negara-negara baru tidak mempunyai dinamika

---

<sup>7</sup> Yusron Asrofi, *Orientalisme, Modernisasi dan Ekonomi-Politik: Tiga Pendekatan di Dalam Studi Sejarah Islam, Mesir Sebagai Kasus*, Majalah Al-Jam'iah, 1989, hal 61.

internal yang mampu menghasilkan perubahan yang berarti. Perubahan kearah modernisasi memerlukan 'kedatangan Barat'. Modernisasi terjadi melalui interaksi antara anggota-anggota kelompok elite setempat yang mempunyai kecenderungan reformasi dan dunia Barat. Disini ada premise bahwa perubahan sejarah yang berarti hanya terjadi disuatu Negara sebagai hasil tindakan sekelompok kecil orang yang disebut sebagai elite. Premise ini diterapkan untuk menganalisa dunia Islam.

Semua bangsa terlibat dalam proses modernisasi. Manifestasi proses ini pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18, yang disebut revolusi industri. Teori modernisasi lahir dalam bentuknya yang sekarang ini, paling tidak menurut tokoh-tokoh Amerika Serikat, sebagai produk sejarah tiga peristiwa penting setelah masa perang dunia II. Modernisasi suatu masyarakat adalah suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.<sup>8</sup>

Hasil kajian baru teori modernisasi ini memperlakukan nilai-nilai tradisional dan modern sebagai dua perangkat sistem nilai yang secara total bertolak belakang. Dalam hasil kajian baru ini, dua perangkat sistem nilai tersebut bukan saja dapat saling terwujud damai berdampingan, tetapi bahkan dapat saling mempengaruhi dan bercampur satu sama lain.

Secara metodologis, kajian baru ini tidak lagi bersandar teguh pada analisa yang abstrak dan tipologi, tetapi lebih cenderung untuk memberikan perhatian yang seksama pada kasus-kasus nyata. Hasil kajian ini tidak lagi merupakan unsur keunukan sejarah.

---

<sup>8</sup> J.W. Schrool, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang*  
Pembangunan, Jakarta, penerbit PT Gramedia, Agustus 1980, hal 1

Sebagai akibat perhatiannya terhadap sejarah dan analisa kasus nyata, hasil kajian baru teori modernisasi tidak lagi memiliki anggapan tentang gerak satu arah pembangunan yang menjadikan barat sebagai satu-satunya model.

Hasil kajian teori baru teori modernisasi ini lebih memberikan perhatian pada faktor eksternal (lingkungan Internasional) dibanding pada masa sebelumnya. Dengan dibimbing oleh konsep-konsep baru seperti misalnya "usaha familiisme" dan "teori brikade", dan "budaya lokal", teori modernisasi telah secara lebih cermat mengamati apa yang disebut dengan tradisionalisme, dan bagaimana nilai tradisional tersebut berinteraksi dengan nilai barat, serta apa peran yang dapat dilakukan oleh tradisional untuk menunjang proses modernisasi.<sup>9</sup> Teori modernisasi baru menghindari untuk menyajikan analisa dan pernyataan yang simplistik, dan mengandalkan analisa pada satu variable. Perhatiannya lebih ditujukan untuk mengamati dan menganalisa secara serentak dan simultan terhadap berbagai pranata sosial yang ada ( sosial, ekonomi, budaya dan politik), berbagai kemungkinan arah pembangunan, dan interaksi antara factor internal dan eksternal.

Teori ini juga menggunakan teori kajian yang berbeda. Teori modernisasi ini tidak lagi mengandalkan analisa kontruksi tipologi dan analisa abstrak. Teori modernisasi baru membawa kembali peran analisa sejarah, dan oleh karena itu memberikan perhatian pada keunikan dari setiap kasus pembanguna yang dianalisa. Teoti ini tidak lagi menggunakan kasus untuk menjelaskan dan

mendukung keabsahan teori. Tetapi hasil kajian teori modernisasi ini menggunakan teorinya unruk menjelaskan masing-masing kasus yang dipelajari.

Dalam kasus Mesir, dimana Husni Mubarak berkuasa di negeri piramid ini sejak 23 tahun lalu tak lama setelah presiden Anwar Sadat. Banyak demonstrasi protes terhadap pencalonan kembali Husni Mibarak, yang digerakkan oleh gerakan Perubahan Mesir. Hal tersebut membawa dampak dalam perpolitikan Mesir saat ini, dimana Amerika menginginkan agar masyarakat Mesir mereformasi dan melakukan pemoderenan terhadap demokrasi Mesir.

Dengan menggunakan kriteria yang disebut oleh Almond “ setiap pendekatan penelitian dapat diuji dari produktifitasnya, apakah pendekatan penelitian tersebut mampu menyediakan satu cara baru dan kreatif untuk mengamati satu persoalan tertentu?”, kita dapat menyimak bahwa hasil karya teori modernisasi telah bergerak kearah yang lebih canggih, tidak lagi mengikuti arah yang ditempuh oleh teori modernisasi klasik.

Abad modern Mesir dimulai dengan pemerintahan Muhammad Ali (memerintah tahun 1805-1848), awal pertumbuhan nasionalisme di Mesir selain karena adanya pengaruh Barat terutama dari Prancis, juga karena minat yang besar dari pemikir-pemikir Arab sendiri.

## **2. TEORI DEMOKRASI**

Ada banyak sekali teori yang membahas tentang demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli sedangkan kata demokrasi itu sendiri berasal dari dua

pokok kata Yunani yaitu “demos” (rakyat) dan “kratein” (memerintah).<sup>10</sup>

Sedangkan demokratisasi memiliki makna:

1. Pergerakan untuk merombak bentuk pemerintahan dengan yang demokratis;
2. Penerapan sistem demokrasi;
3. Pendemokrasian.

Penjelasan dari ketiga makna proses demokratisasi di atas adalah:

*Pertama*, pergerakan untuk merombak bentuk pemerintahan dengan yang demokratis maksudnya adalah bahwa sistem pemerintahan yang telah ada dan dirasakan belum mencerminkan distribusi kekuasaan yang merasa harus segera diubah agar tercipta distribusi kekuasaan yang merata. Ini harus dilakukan dengan adanya undang-undang yang menjamin sebab pemerintah yang demokratis akan lebih mendengarkan aspirasi atau tuntutan rakyatnya. Ketiga cabang lembaga penyelenggara pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memiliki kedudukan yang sama.

*Yang kedua*, adalah penerapan sistem demokratisasi. Sistem demokrasi meniscayakan adanya mekanisme *check and balance* atau adanya keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan artinya setiap penyelenggara pemerintahan harus bekerja sesuai tugas, wewenang serta fungsinya masing-masing. Satu sama lain tidak boleh mempengaruhi (dalam arti negatif) dalam setiap pengambilan keputusan ini dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan yang berujung pada ketidakmaksimalan dalam bekerja.

---

<sup>10</sup>Keastara, Deshananta, *Sistem Pemerintahan Demokrasi Bandung*, Esopo, 1987

Yang ketiga adalah pendemokrasian, maksudnya adalah peningkatan pelaksanaan nilai-nilai yang bersifat demokratis seperti keterbukaan, kebebasan, persamaan hak, partisipasi warga negara secara aktif. Tidak adanya demokratisasi dalam arti sekedar prosedur formal dari demokrasi seperti adanya pemilu yang jujur, pembatasan kekuasaan penyelenggara negara dan lain-lain.

Dalam dunia politik modern, demokrasi didefinisikan seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika Abraham Lincoln pada tahun 1863 yaitu "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" (*government of the people, by the people, for the people*).<sup>11</sup>

Berdasarkan dari definisi diatas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yaitu:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilu yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan beroposisi.
5. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> William Ebsstein, "Demokrasi" dalam William D. Halsey & Bernard Johnston (Eds), *Colliers Encyclopedia* (New York: MacMillan Educational Company, 1998), VIII: 75, dalam Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

<sup>12</sup> Umaruddin Masdar dkk, *Mengesah Natari Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta, penerbit LKIS, 1999, hal 83.



Samuel P Huntington menyebutkan bahwa terjadinya proses transisi demokrasi dari rezim-rezim non demokratis dapat melalui tiga proses yaitu: Pertama: Transformasi atau *performa*, yaitu proses demokrasi terjadi ketika elite berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Kedua: *Replacement* atau *ruptura*, yaitu proses demokrasi terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Ketiga: *Transplacement* atau *ruptforma*, yaitu proses demokrasi terjadi apabila demokratisasi merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi.<sup>13</sup>

Dalam kenyataan, pelaksanaan proses demokratisasi sangat sulit untuk diwujudkan, Huntington menyebutkan adanya beberapa faktor yang menghambat demokrasi dapat terwujud di beberapa negara, dimana faktor-faktor tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori besar yaitu:

1. Politik merupakan penghalang yang potensial dan signifikan menghalangi perkembangan demokrasi pada negara-negara yang masih otoriter dan akan menjadi konservatif yang dengan gigih akan menentang demokrasi. Konflik politik yang terjadi dalam elite juga berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi, sebab jika elite politik tidak solid demokrasi juga sulit terlaksana.
2. Budaya, tradisi-tradisi budaya yang sangat bervariasi dan tidak demokratis tentunya akan menghambat penyebaran-penyebaran demokrasi dalam

---

<sup>13</sup> Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, ter. Asril Marjohan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, cet II, 1997, hal 47.

masyarakat yang tentunya tidak akan memberikan legitimasi yang kuat pada lembaga-lembaga demokrasi tersebut secara efektif.

3. Ekonomi, kemiskinan merupakan suatu penghalang utama demokrasi di suatu negara. Karena demokrasi sangat bergantung pada perkembangan ekonomi di suatu negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan tiga kategori proses demokratisasi yang dipaparkan oleh Huntington, maka proses demokratisasi yang terjadi di Mesir digolongkan pada kategori ketiga, yaitu *Transplacement* atau *Reptiforma*. Seperti diketahui bahwa kelompok pemerintahan atau yang berada pada lingkungan sistem kekuasaan (pemerintah) di Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser dan kelompok yang berada di luar lingkungan kekuasaan, memiliki kesamaan visi dalam mendorong demokratisasi di Mesir.

Sementara itu berdasarkan beberapa faktor yang menjadi hambatan demokrasi menurut Huntington yang dihubungkan dengan apa yang terjadi di Mesir adalah, bahwa realitas politik yang terjadi di Mesir satu sisi menunjukkan adanya nuansa demokratis apalagi ketika kematian Nasser yang kemudian digantikan oleh Anwar Sadat, yang membuat konstitusi baru diundangkan, dimana republik Arab Mesir adalah sebuah negara Demokrasi dan Sosialis yang berdasarkan kepada aliansi kekuatan pekerja rakyat (pasal 1).<sup>15</sup>

Mesir, yang meskipun secara normatif konstitusional sudah membagi ketiga cabang kekuasaan pemerintahannya sesuai prosedur formal demokrasi, juga bisa mengelakan diri apabila kembali ke hirarki kekuasaan yang ada sesuai

---

<sup>14</sup>Huntington, *Op.Cit.*, hal 381-404

<sup>15</sup>M. Dira Sihudi, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung, P. T. Eresco, 1992, hal 90

konstitusi Mesir itu sendiri, yaitu bahwa ketiga cabang tersebut ada di bawah kontrol atau pengawasan iman. Sehingga Mesir bisa dikatakan Negara yang otoriter, karena kekuasaan berpusat pada satu orang saja yaitu imam atau pimpinan spiritual. Beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh imam dapat dijadikan bukti bahwa kekuasaan imam sangatlah besar. Diantaranya adalah saat Nasser menerbitkan UU Agraria yang membatasi penguasaan tanah, dalam UU tersebut diatur tentang batas maksimum kepemilikan tanah.

Huntington mengidentifikasi ada tiga macam interaksi yang menentukan dalam proses demokratisasi. Tiga macam interaksi tersebut adalah: interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi, interaksi antara kelompok pembaharu dan kelompok konservatif dalam pemerintah koalisi, dan interaksi antara kelompok moderat dan kelompok ekstrimis di dalam oposisi.<sup>16</sup>

Suatu kompromi yang jelas sangat penting pada sebagian besar kasus demokratisasi barangkali adalah 'tawar menawar demokratis' (*the democratic bargain*), yakni penyeimbangan antara partisipasi dengan pemoderetan.<sup>17</sup> Gambaran tersebut bagi Mesir adalah penting dilakukannya proses demokratisasi yang kendalinya ada pada Gamal Abdul Nasser. Kekuatan lama jelas tidak akan melepaskan begitu saja kekuasaan politik yang sudah ada di tangan. Untuk itulah perlu adanya kompromi dan win-win solution.

Lazimnya sebuah negara Mesir dapat dikatakan sebuah negara merdeka yang tentunya memiliki sistem politik dalam mengatur penyelenggaraan jalannya pemerintahan. Gamal Abdul Nasser merupakan pemimpin Mesir yang telah

melakukan dan menerapkan proses demokrasi dalam pemerintahannya waktu itu hingga sekarang, dalam kepemimpinan Husni Mubarak dianggap sebagai penjelmaan dari kegagalan dalam mewujudkan demokrasi dan juga mencemari konsep sekularisme yang luhur. Bush (AS) meminta Mesir melakukan Reformasi demokrasi, upaya tersebut mendapat perlawanan dari Husni Mubarak, terutama dalam menentukan pemerintahan kedepan harus dilakukan oleh rakyat Mesir sendiri tanpa ada campur tangan asing.<sup>18</sup>

Menurut David Easton, sistem politik adalah merupakan alokasi nilai-nilai, dalam pengalokasiannya yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat.<sup>19</sup> Lebih lanjut Easton menyatakan bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa suatu sistem politik akan dapat berjalan atau berlangsung manakala ada pengalokasian nilai-nilai yang dapat diterapkan pada masyarakat tersebut dalam menjalankan kewenangan dan kekuasaannya melalui kesepakatan yang dapat mengikat.

Sedikit berbeda dengan David Easton, Gabriel A. Almond, mengatakan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka, sementara masyarakat yang tidak atau belum merdeka tidak terdapat sistem politik, yang ada sistem politik dari masyarakat atau negara yang

---

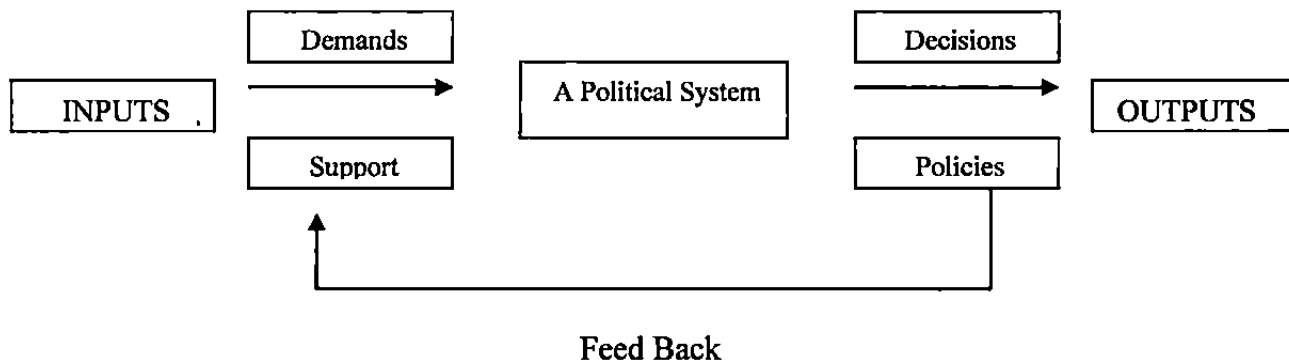
<sup>18</sup> WWW. Hidayatullah. Com, sabtu, 03 Mei 2003.

<sup>19</sup> *System Politics: Suatu Pendekatan (New York: Free Press, 1983) Hal. 2*

menjajah atau menguasainya.<sup>20</sup> Artinya bagi negara atau masyarakat yang belum merdeka dan belum atau tidak ada sistem politik, akan tetapi tetap ada aturan-aturan yang berlaku didalamnya berupa kesepakatan yang dipengaruhi lingkungannya dalam memberikan input untuk menghasilkan output. (Lihat Diagram)

**Gambar 1.1**

Environment



Environment

Sumber: Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, 1982, hal 9.

Sementara sistem politik itu sendiri, baik di negara Muslim atau dimanapun tak bisa menghindari manajemen persaingan, bahkan pertikaian kepentingan. Memang alokasi sumber daya yang dipaksakan akan penentuan batas-batas tak terpisahkan dari proses politik, tetapi bukan menjadi keseluruhannya. Karena politik muslim melibatkan perlombaan dan persaingan penafsiran simbol dan kontrol atas lembaga, baik formal maupun informal yang membuat dan mempertahankan simbol-simbol dan lembaga-lembaga tersebut

Mesir juga masih jauh dari praktek-praktek demokrasi. Pers cukup bebas melakukan kritik terhadap pemerintah tetapi larangan pemuatan serial buku Najib Mahfudz, pemenang hadiah nobel bidang sastra, yang berjudul *Children of Gebalawi* di koran. Adanya partai politik tunggal juga berakibat pada kurangnya saluran politik. Namun diantara berbagai sumber instabilitas di dalam negeri, gerakan ikhwanul muslimin tampaknya yang paling dicermati.

Dari diagram Gabriel A. Almond mengenai sistem politik sebagai sistem interaksi yang kemudian menghasilkan input dan output dapat diterapkan dan dijadikan sebagai bahasan mengenai proses demokrasi di Mesir. Sejak berdirinya Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928, Ikhwanul sudah merupakan kelompok paling vocal dan menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang sekuler dan kebarat-baratan. Mereka menginginkan Mesir sebagai negara Islam. Adanya tekanan-tekanan dari Amerika yang menginginkan demokrasi di Mesir juga merupakan input atau pendukung terhadap perubahan demokrasi di Mesir.

#### **F. Hipotesa**

Penulisan dan penelitian ilmiah selalu berdasarkan pada suatu hipotesa dengan permasalahan dan kerangka teori yang sudah ditetapkan dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

Proses modernisasi politik yang dilakukan oleh Husni Mubarak terhadap Mesir, dapat menciptakan demokrasi yang ditandai dengan:

1. Membentuk sistem politik yang demokratis.

2. Kebijakan politik terhadap munculnya kelompok pro demokrasi.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah dalam penelitian dan menghindari kesulitan mencari data, maka data yang digunakan antara tahun 1981-2005 dikawasan teluk (Timur-tengah), yang dimana wilayah tersebut menjadi target sasaran penghancuran peradaban Islam oleh negara-negara Barat dengan masuknya budaya demokrasi dalam politik Mesir. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan data atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum atau sesudah tahun tersebut, hal tersebut tidak lain digunakan hanya sekedar untuk mencari data dan fakta yang valid. Selain itu skripsi ini, jangkauan penelitian dipandang perlu untuk memperoleh pembahasan yang lebih efisien dan efektif, oleh karena itu penulis akan membatasi pada konflik yang terjadi pada masa kepemimpinan Husni Mubarak.

### **H. Metode Penelitian**

Dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik sebuah hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data yang empiris., teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik Library research atau penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, jurnal ilmiah, makalah-makalah,

majalah-majalah, bulletin, surat kabar, kliping, internet maupun dokumentasi yang lain.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Skripsi yang berjudul “Modernisasi Politik Mesir Pada Masa Husni Mubarak”, disusun secara sistematis menjadi 5 BAB, yaitu:

- BAB I** :Bab ini merupakan bab pendahuluan, yaitu penjelasan secara umum dari isi skripsi. Bagian ini meliputi: Alasan pemilihan judul, Latar belakang masalah, Tujuan penelitian, Perumusan masalah, Kerangka dasar pemikiran, Hipotesa, Jangkauan penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan.
- BAB II** :Bab ini merupakan pembahasan tentang Politik Islam Mesir.
- BAB III** :Bab ini berisi tentang proses politik Mesir menuju Modernisasi di era Husni Mubarak.
- BAB IV** :Bab ini berisi tentang Bentuk Demokrasi Mesir.
- BAB V** :Bab ini adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori yang salah satu landasannya dan kata penutup serta saran.